

**DIFERENSIASI KONTRAK STANDAR DIKAITKAN DENGAN
PENERAPAN PRINSIP UNIDROIT
Bambang Herlambang Irawan Nurraid**

ABSTRAK

Dunia semakin menunjukkan perkembangannya baik dari segi budaya hingga adaptasi hukum yang kian membawa lingkungan Bisnis Internasional ini menjadi lebih baru dan modern. Perubahan ini didasari atas peristiwa hukum yang terjadi salah satunya adanya problematika hukum dalam melakukan perjanjian Kerjasama dalam skala internasional seperti contoh perjanjian peminjaman kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) oleh NINE AM Ltd yang terhambat proses pembayaran hutang dan halangan dalam mengajukan gugatan. Hal ini tentu menjadi pokok permasalahan sebab surat perjanjian yang ditulis oleh NINE AM Ltd tidak menggunakan Bahasa Indonesia sebagai negara pilihan hukum dan harus berbentur dengan UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Prinsip UNIDROIT merupakan jawaban atas masalah tersebut dimana didalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak yang dapat mendorong para pihak untuk bisa memberi klausul atau memilih prinsip ini sebagai pilihan hukum. Sebab dalam penggunaan unidroit sebagai pilihan hukum sangat dapat mengharmonisasikan hubungan perjanjian antarpihak dan terhindar daripada permasalahan yang berbenturan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Maka bagi negara manapun yang telah meratifikasi prinsip ini tentu seharusnya mengutamakan kemudahan dan fleksibilitas dalam merancang perjanjian, proses yang rumit dan berbelit-belit memunculkan sikap hubungan yang kurang layak dipandang apalagi dapat mempengaruhi perkembangan bisnis secara luas dengan berbagai negara.

Kata Kunci : Perjanjian, Prinsip UNIDROIT, Kebebasan berkontrak

**DIFFERENTIATION OF STANDARD CONTRACTS IN RELATION TO
THE APPLICATION OF THE UNIDROIT PRINCIPLE**

Bambang Herlambang Irawan Nurraid

ABSTRACT

The world is increasingly showing its development both in terms of culture and legal adaptations that increasingly bring this International Business environment to be newer and more modern. This change is based on legal events that occur, one of which is the existence of legal problems in conducting Cooperation agreements on an international scale such as the example of a loan agreement to PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) by NINE AM Ltd which is hampered by the process of paying debts and obstacles in filing a lawsuit. This is certainly a problem because the agreement written by NINE AM Ltd does not use Indonesian as the country of choice of law and must collide with Law No. 24 of 2009 concerning Flags, Languages, and State Emblems, as well as National Songs. The UNIDROIT principle is the answer to the problem where it contains the principle of freedom of contract that can encourage parties to be able to give clauses or choose this principle as a choice of law. Because the use of unidroit as a choice of law can really harmonize the relationship between parties and avoid problems that clash with the positive law that applies in Indonesia. So for any country that has ratified this principle should certainly prioritize ease and flexibility in drafting agreements, a complicated and convoluted process raises the attitude of relationships that are less worthy of being seen let alone can affect the development of business at large with various countries.

Keywords: Agreement, UNIDROIT Principles, Freedom of contract